

## IMPLEMENTASI PROGRAM RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KAMPUNG SEYOLO DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN

*Randy Koterisa<sup>1</sup>*  
*Ronny Gosal<sup>2</sup>*  
*Frans Singkoh<sup>3</sup>*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung Di Kampung Seyolo Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi lapangan serta melalui kajian dokumen. Dalam penelitian ini informannya berjumlah 1 instansi yaitu pemerintah kampung seyolo, 1 orang kepala kampung seyolo, ketua baperkam dan pengurus respek, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). belum optimalnya implementasi program rencana strategis pembangunan kampung (Respek) di kampung seyolo. Sesuai dengan peraturan daerah khusus nomor 10 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan dan kelembagaan kampung belum terlaksana dengan baik, karena dalam pelaksanaannya banyak terdapat kelalaian tugas dan tanggung jawab oleh pelaksana program respek. (2). Faktor penghambat pelaksanaan program respek di temukan sejumlah hambatan diantaranya kurang adanya jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik oleh pelaksana program respek, Sumber daya manusia yang masih kurang berkompeten dalam pelaksanaan program respek dengan tidak memenets anggaran yang diolaksikan untuk pembangunan MCK dan juga pemasangan meteran lampu kepada masyarakat. Disposisi /sikap pelaksana program respek yang terdapat indikasi penyalagunaan anggaran dengan tidak mengacu pada RAB yang telah disusun. Struktur pengurus kelompok kerja (Pokja) Respek tidak lengkap, yang hanya berjalan cuma Kepala kampung, bendahara, dan TPKK sementara untuk Tim Penyusun Usulan Program dan Tim Ferifikasi tidak di lengkapi, sehingga berdampak terhadap tidak selesainya pembangunan MCK,

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Implementasi Program,  
Rencana Strategis Pembangunan Kampung.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Program RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) adalah harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat yang merupakan wujud dari upaya pemerintah terhadap pembangunan, program respek ini lebih difokuskan pada infrastruktur pemberdayaan, kesehatan dan lain-lain. Program ini juga memiliki arti penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan serta evaluasi program respek. Dimana untuk membantu kelancaran pelaksanaan program respek tersebut. Pemerintah juga melibatkan masyarakat dengan membentuk kelompok kerja (pokja) respek ditingkat kampung dengan ketentuan Kepala Kampung sebagai penanggung jawab, tokoh masyarakat sebagai ketua pokja, dan seluruh ketua RT/RW ditambah minimal seorang ahli bangunan, ditambah juga dengan seorang bendahara yang di angkat dengan surat keputusan Kepala Kampung sebagai ketua dan penanggung jawab program respek di tingkat kampung dan beberapa masyarakat sebagai anggota/pekerja, pokja bersifat ad Hoc (apabila berdasarkan kesepakatan kampung yang bersangkutan memperoleh dana respek). Keberhasilan untuk dapat bangkit dari kemiskinan sangat tergantung dari kemauan, tekad dan optimisme seluruh pelaku pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembangunan karena hanya dengan adanya partisipasi dari masyarakat penerima program pemberdayaan maka

hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Masyarakat tentunya memiliki hak untuk berperan dalam perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dari pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerah adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat diberikan manfaat terhadap kesejahteraan hidupnya. Tetapi Kondisi masyarakat yang lebih begitu lama terbiasa disubsidi oleh pemerintah, telah mematikan kreativitas, Sehingga usaha peningkatan partisipasi masyarakat mulai dari titik awal dan benar-benar membutuhkan usaha bersama dari seluruh elemen Negara. Belajar kedalam berbagai kekurangan dan mengatasi kendala dan kelemahan pada program pengetasan yang sebelumnya, saat ini Indonesia memiliki program rencana strategis pembangunan kampung respek dipedesaan sebagai program pembangunan berbasis masyarakat. Didalamnya ada upa perencanaan masyarakat sebagai strategi untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama keluarga miskin. program rencana strategis pembangunan kampong pedesaan memiliki konsep melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemantauan dan evaluasi.

RencanaStrategis Pembangunan Kampung Respek dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat didalam proses pembangunan, peningkatan kapatitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan

umum, dan meningkatkan kapasitas lembaga lokal yang berbasis masyarakat. Pada program ini masyarakat bukan lagi sebagai obyek melainkan subyek dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Masyarakat menjadi mandiri dan memiliki kesadaran kritis akan partisipasinya terhadap pembangunan itu sendiri. Bahkan masyarakat pun akan memiliki kesempatan lapangan pekerjaan dalam pelaksanaan program ini.

Program respek ini berbasis strategis pembangunan masyarakat yakni basisnya adalah bagaimana upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memecahkan persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Proses pemberdayaan masyarakat ini terdiri tahap pembelajaran, kemandirian masyarakat dan keberlanjutan. Sebagaimana halnya pelaksanaan program rencana strategis pembangunan kampung di Kampung Seyolo Distrik teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, permasalahan pembangunan yang tidak fleksibel dengan biaya operasional yang tinggi, selalu menjadi penghambat yang sering ditemui oleh masyarakat dalam program respek seperti kurangnya, sosialisasi dan transparansi program oleh pengurus Respek tingkat kampung kepada masyarakat agar masyarakat juga diikuti sertakan dalam membicarakan program-program pembangunan apa saja yang diprioritaskan untuk dilaksanakan sehingga sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat agar dapat menanggulangi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan.

## Tinjauan Pustaka

Implementasi memegang peranan yang sangat penting dalam

kebijakan publik, karena suatu kebijakan tidak akan memiliki arti apa-apa jika tidak diimplementasikan. Melalui implementasi kebijakan maka rencana-rencana atau program-program yang masih bersifat abstrak diusahakan perwujudannya menjadi kenyataan. Seperti yang dikemukakan oleh George Edward Dalam Mulyadi (2016:25) bahwa Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Sementara itu Solichin (2008:65), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah Negara. Biasanya, implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Arifin (2014:67) Implementasi adalah merupakan konsep dinamis yang melibatkan secara terus-menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dapat dilaksanakan, yang mengatur aktivitas- aktivitas yang mengarah pada penempatan suatu program.

Selain sebagai proses, Implementasi juga sering dipandang sebagai hasil atau output, dan sebagai akibat atau outcome. Dari sudut hasil, implementasi menyangkut persoalan seberapa jauh tujuan yang telah deprogramkan itu benar-benar tercapai secara memuaskan. Dari sudut akibat, implementasi menunjukkan pada perubahan yang nyata di dalam berbagai masalah besar yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Menurut Gordon dalam Mulyadi (2016:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan

yang diarahkan pada realisasi program, dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat di terima dan fleksibel. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran, atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap relisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan tersebut. Namun kebijakan Publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn dalam Solichin (2008:61) telah berbagai pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) ini dalam dua (2) kategori yaitu sebagai berikut pertama : non implementation (tidak terimplementasikan) dan kedua: unsuccessful implementation (Terimplementasikan)

Kegagalan kebijakan publik menurut Andrew Dunsire dalam Solichin (2008:61) dinamakan sebagai implementation gap, yaitu suatu istilah

yang dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbendaan antara apa yang diharapkan (direncanakan). Oleh pembuatan kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai ( sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbendaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang disebut oleh Walter Williams dalam Solichin ( 2008 : 62) sebagai implementation capacity dari organisasi/faktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (dalam dokumen formal) dapat dicapai

Menurut pendapat Solichin (2008:63) bahwa dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi / instansi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni :1) pemrakarsa kebijakan/pembuatan kebijakan (the center atau pusat :2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery); dan 3 ) faktor-faktor perorangan di luar badan- badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran (target group).

Dilihat dari sudut pandang pusat, maka analisis implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga ditingkat pusat untuk mendapat kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat tingkat yang lebih rendah/ daerah dalam upaya mereka untuk memberikan pelayanan atau untuk mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran program yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hogwood dan Gunn

dalam Solichin ( 2008 :73) bahwa : Tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan program atau proyek secara tepat sudah tentu berada di pundak para staf administrasi, termasuk di antaranya para perancang pembangunan dan para manajer, sebab merekalah yang pada umumnya telah dibekali dengan sejumlah kemampuan teknis administrasi tertentu, misal network planning dan control, manpower forecasting dan inventory control sehingga dapat diharapkan bahwa sejak dini setiap hambatan yang bakal terjadi dapat diantisipasi/diperkirakan sebelumnya dan tindakan-tindakan yang cepat dan tepat dapat segera dilakukan. Sementara itu Menurut Grindle (Solichin, 2008:59) proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tugas-tugas dan sasaran tersebut. Program rencana strategis pembangunan kampung (Respek) pada hakikatnya merupakan kegiatan perencanaan yang bersifat strategis karena memiliki batasan waktu dan target-target tertentu yang pencapaiannya diharapkan bisa mengubah kualitas hidup masyarakat partisipan. Perbedaan spesifik program ini dengan rencana pemerintah lainnya adalah adanya pembalikan ideologis di dalamnya. Masyarakat menjadi aktor utama dalam hampir semua tahapan program, asumsinya mereka memiliki komitmen idealisme, dan kapasitas memadai untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melestarikan program pembangunan.

Secara kontekstual, program Respek merupakan penjabaran dari

empat strategi dasar dalam konsepsi “Papua Baru” yang dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Papua (2006-2011): pembinaan aparatur dan kelembagaan pembangunan, infrastruktur, penciptaan kesejahteraan serta rasa aman dan damai keempat strategi dasar ini menjadi pilar utama keberhasilan program Respek.

Respek juga bias disebut sebagai sebuah program “Monumental” bahkan ambisius, ditinjau dari cakupan wilayah (kampung-kampung), besaran dana yang disalurkan, expertise dan kolaborasi multiaktor yang terlibat ruang hidup yang hendak diubah dan bobot politik affirmative yang tinggi, serta Respek juga merupakan agenda pembangunan kolaboratif yang relative rumit dan multidimensional. Karena memang dalam proses penyalurannya baik dari provinsi sampai turun ke tingkat kampung sebagai objek peruntukan program Respek tersebut banyak dilewati oleh kelompok-kelompok kepentingan. Kebijakan Respek merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan Respek dengan sasaran tertentu pula. Berdasarkan pemikiran ini kebijakan Respek dan lebih khususnya program Respek daerah dipandang semata-mata sebagai tindakan teknik dan administrasi tetapi juga merupakan melibatkan demi kepentingan masing-masing. Menurut Hadi Setia Tunggal (2009:3) otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam

rangka peningkatan pelayanan (Service), dan akselerasi (Acceleration Development), serta pemberdayaan (Empowerment) seluruh rakyat diprovinsi papua, terutama orang asli papua.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana data hasil penelitian ini sering digunakan dalam pengamatan sosial langsung. Penelitian deskriptif ini menurut Moleon (2006) bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena social, ekonomi, dan budaya masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan. Fokus penelitian pada dasarnya adalah sumber pokok dari masalah penelitian ( Moleong 2006 : 268 )

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi oleh peneliti yaitu bagaimana implementasi program rencana strategis pembangunan kampung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Respek yang dijadikan indikator untuk menggambarkan Implementasi Program yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teori implementasi menurut model Edward dalam Mulyadi (2016:24), implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

### 1. Komunikasi,

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana hubungan komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh Kepala kampung dengan pengurus resepek atau kelompok kerja

(pokja) di kampung dalam melaksanakan program respek, apakah sudah berjalan optimal atau perlu untuk di optimalkan.

### 2. Sumber daya,

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana kemampuan sumber daya, atau kompetensi, kualitas, dan skill pengurus respek baik dari kepala kampung sebagai penanggung jawab sampai pada jajarannya, pengurus atau (pokja) respek dalam mencanangkan program respek dan dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

### 3. Disposisi Atau Sikap Pelaksana

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana karakteristik sikap pengurus atau pelaksana program respek di kampung, apakah mereka sudah memiliki sikap jujur, adil dan tidak menyimpang bahkan melakukan transparansi program dan akuntabilitas program respek kepada masyarakat dan kepada pejabat yang lebih tinggi.

### 4. Struktur Birokrasi

Dalam penelitian ini juga peneliti akan melihat bagaimana struktur pengurus respek, atau kelompok kerja (pokja) di kampung, sudah berjalan sesuai dengan hirarkis struktur pengurus yang ada, dengan bertanggung jawab atas uraian tugas (Job Description), dengan melibatkan tenaga ahli perencanaan pembangunan di didalam struktur tersebut, sehingga dapat mengimplementasikan program respek secara efektif. Penelitian ini berlokasi di Kampung Seyolo, Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan

## Hasil Penelitian

Pelaksanaan program respek di kampung seyolo, tentunya belum berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, karena dalam pelaksanaannya pemerintah banyak mengalami kendala-kendala atau faktor-faktor penghambat,

yang dimana beriringan juga dengan faktor-faktor yang pendukung Implementasi kebijakan/ program respek. Berikut ini akan di bahas berurutan berdasarkan indikator yang dijadikan acuan dalam mengukur implementasi program rencana strategis pembangunan kampung di kampung seyolo. Dalam indikator ini menekankan bahwa komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program respek di kampung seyolo. Hal itu terwujud jika para implementor program respek dalam hal ini kepala kampung, bendahara, dan TPKK saling membangun hubungan komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan program respek, seperti dalam penyusunan RAB untuk pembangunan MCK hal tersebut tentunya harus dikonsultasikan dan di koordinasikan antara TPKK dengan kepala kampung dan juga bendahara, sehingga dalam pembelanjaan material, dan bahan bangunan itu tidak terjadi pemborosan anggaransupaya pembangunan MCK yang dibangun bisa diselesaikan juga dengan baik.

Komunikasi dan koordinasi yang dibangun baik antara para implementor program respek dapat membuahkan hasil yang optimal, karena tujuan pelaksanaan program itu telah tercapai yaitu program ini telah tepat sasaran. Pelaksanaan program respek harus di sesuaikan dengan dengan anggran, dan RAB yang di buat, untuk itu penting sekali di bangun komunikasi dan korrndinasi yang baik. Dalam indikator ini melihat dari sisi kemampuan sumber daya implementor dalam melaksanakan program respek yaitu pembangunan MCK dan pemasangan meteran lampu ke rumah-rumah masyarakat, sudah berjalan baik

atau belum. Di Kampung Seyolo sendiri pengurus program respek baik kepala kampung, bendahara, dan Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) dikatakan belum berjalan baik. Hal itu terlihat jelas dimana dalam pelaksanaan pembangunan MCK tidak diselesaikan dengan baik oleh pengurus respek karena kurangnya kemampuan pengurus respek dalam memenets anggaran dan mengacu pada RAB yang telah di susun sehingga terjadi pemborosan anggran.

Juga kurangnya kemampuan kepala kampung sebagai penanggung jawab program respek dalam memanfaatkan warga masyarakat kampung yang memiliki kemampuan, dan skill di bidang perencanaan pembangunan kampung untuk juga dilibatkan dalam struktur pengurus respek, sehingga mereka bisa bekerja konsisten dengan RAB dan bisa memenets anggaran dan waktu mengerjakan pembangunan MCK. Kemudian kurangnya kemampuan konsep dan ide juga dalam mencangkan program-program inovatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat kampung, seperti program pemberdayaan Usaha Menengan Kecil Masyarakat. Sementara untuk pemasangan meteran lampu sudah berjalan baik karena bentuk pekerjaannya yang tidak terlalu rumit. Dimana TPKK hanya melakukan survey sekaligus pendataan rumah-rumah masyarakat kampung seyolo yang meteran lampunya belum di pasang, lalu setelah itu mereka melaporkan ke bendahara, dan kepala kampung untuk pembayaran meteran lampu ke PLN lalu kemudian di pasang pada rumah-rumah masyarakat. Pada indikator ini menekankan pada sikap pelaksana program respek di kampung seyolo dalam mengerjakan pembangunan MCK dan pemasangan

meteran lampu. Dalam pelaksanaan program-program tersebut tentunya banyak terdapat indikasi sikap menyimpang yang dilakukan oleh para implementor program respect di kampung seyolo, dimana mereka tidak melakukan transparansi program tersebut melalui sosialisasi pekerjaan baik untuk pembangunan MCK begitu juga pemasangan lampu, juga terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan belanja bahan bangunan yang tidak mengacu pada RAB, serta melakukan pemborosan anggaran dengan memanipulasi nota belanja.

Kemudian sikap TPKK dalam pelaksanaan pembangunan MCK yang juga sengaja dengan menunda-nunda waktu atau jam kerja untuk para tenaga tukang, sehingga berdampak pada tidak selesai pembangunan MCK. Sangat diharapkan pengawasan yang ketat oleh penanggung jawab program respect yaitu kepala kampung, agar bisa memantau, secara langsung sikap pelaksana dalam mengerjakan setiap tahapan pekerjaan dengan baik dan benar serta mengacu pada RAB yang telah di susun . Banyak terdapat sikap apatis dari pelaksana program respect untuk saling bekerja sama dan bersinergi dalam melaksanakan program respect yang telah ditetapkan bersama melalui musyawarah kampung, juga untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membicarakan program-program apa saja yang diprioritaskan seperti BAK penampung air bersih untuk masyarakat, ini belum dilaksanakan padahal air ini merupakan kebutuhan primer manusia baik untuk konsumsi, mencuci dan mandi. Pada indikator ini akan menekankan pada kelengkapan pengurus program respect yang juga sebagai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program

respect. karena struktur pengurus respect di Kampung seyolo tidak lengkap maka tidak terbentuk suatu pola-pola hubungan garis koordinasi dan komando antara kepala kampung dengan pendamping kampung, Tim penulis usulan program (TPU) dan tim verifikasi dalam mensinergiskan pelaksanaan program respect baik pembangunan MCK, dan juga pemasangan meteran lampu bahkan mencanangkan program-program inovasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat kampung.

Dalam pelaksanaan program respect di kampung seyolo tidak adanya kebijakan dari kepala kampung dalam melibatkan dan memanfaatkan masyarakat yang mempunyai sumber daya untuk melengkapi struktur pengurus pokja respect agar supaya mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan setiap program yang telah di tetapkan. Apabila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program, para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Implementasi suatu program masih gagal, apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang di perlukan dalam melaksanakan suatu program. kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak orang, serta pemborosan sumber daya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam struktur pengurus pokja respect. untuk itu perlu ada pembenahan kelembagaan kampung dengan melengkapi struktur pengurus pokja respect, sehingga dengan kekuatan sumber daya yang lengkap dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan program respect di kampung seyolo. Program rencana strategis



pembangunan kampung (Respek) pada hakikatnya merupakan kegiatan perencanaan yang bersifat strategis karena memiliki batasan waktu dan target-target tertentu yang pencapaiannya diharapkan bisa mengubah kualitas hidup masyarakat partisipan. Perbedaan spesifik program ini dengan rencana pemerintah lainnya adalah adanya pembalikan ideologis di dalamnya. Masyarakat menjadi aktor utama dalam hampir semua tahapan program, asumsinya mereka memiliki komitmen idealisme, dan kapasitas memadai untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melestarikan program pembangunan.

Secara kontekstual, program Respek merupakan penjabaran dari empat strategi dasar dalam konsepsi "Papua Baru" yang dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Papua (2006-2011): pembinaan aparatur dan kelembagaan pembangunan, infrastruktur, penciptaan kesejahteraan serta rasa aman dan damai keempat strategi dasar ini menjadi pilar utama keberhasilan program respek. Kebijakan Respek merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan Respek dengan sasaran tertentu pula. Berdasarkan pemikiran ini kebijakan Respek dan lebih khususnya program Respek daerah dipandang semata-mata sebagai tindakan teknik dan administrasi tetapi juga merupakan melibatkan demi kepentingan masing-masing. Menurut Hadi Setia Tunggal (2009:3) otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan (Service), dan akselerasi (Acceleration Development), serta pemberdayaan (Empowerment) seluruh rakyat diprovinsi Papua, terutama orang asli Papua.

## Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan serta berdasarkan uraian pembahasan mengenai implementasi program rencana strategis pembangunan di kampung Seyolo distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengamatan terhadap implementasi program rencana strategis pembangunan di kampung Seyolo belum berjalan secara optimal. Di mana yang berjalan cukup baik adalah pemasangan meteran lampu kerumah masyarakat, sedangkan untuk program pembangunan MCK pekerjaannya belum diselesaikan, sampai saat ini masih tinggal terbengkal.
2. Pelaksanaan program Respek dalam hal ini pembangunan MCK belum diselesaikan karena pengurus Pokja Respek tidak membangun hubungan komunikasi dan koordinasi dengan baik, kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran dengan baik sesuai dengan peruntukannya, bahkan masih ada sikap pelaksana yang menyimpang dalam melakukan manipulasi nota belanja bahan bangunan, serta tidak lengkapnya struktur pengurus Respek, sehingga berdampak pada tidak selesainya pembangunan MCK.
3. Kendala yang ditemui juga kurangnya pengawasan yang ketat oleh Baperkam dalam pelaksanaan

program respek baik secara fisik dalam melakukan survey dan non fisik berupa tuntutan pemeriksaan laporan penggunaan anggaran dalam mengerjakan setiap program baik pemasangan lampu maupun pembangunan MCK yang telah ditetapkan.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Di perlukan jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik antara kepala kampung, ketua baperkam, dan TPKK dalam pelaksanaan program respek di kampung seyolo
2. Perlu adanya kebijakan dari kepala kampung seyolo dalam melakukan evaluasi kinerja pengurus yang masih ada indikasi penyimpangan, tidak jujur, adil, demokratis, dan masih ada tindakan diskriminasi serta lakukan resuffe pengurus

Agustinova, Danu Eko. 2015.

Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Tori & Praktik). Yogyakarta

Hadi, S. Tunggal 2009. Kompilasi

Peraturan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Jakarta : Harvarindo

Meleong, L. J 2006. Metodologi

Penelitian Kualitatif, Bandung : CV.

Mandar Maju

Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan

Publik Dan Pelayanan Publik (Konsep

Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik

Berbasis Analisis Bukti Untuk

Pelayanan Publik). Bandung : alfabeta

Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian

Kualitatif. Bandung : Alfabeta

respek dengan memanfaatkan anggota masyarakat yang berkompeten dan berkualitas sehingga bisa mampu dalam mencanangkan program respek yang berbasis pemberdayaan masyarakat secara kreatif dan inovatif.

3. Perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan kampung, melalui pelatihan dan pembinaan melalui Stakeholder terkait, baik Dinas pemberdayaan masyarakat kampung, maupun bagian setda tata pemerintahan kampung dan kelurahan, dan distrik teminabuan. Dengan mengacu pada peraturan daerah khusus Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Dan Kelembagaan Kampung, serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Sehingga pelaksanaan program respek bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan efektif dan efesien

## DAFTAR PUSTAKA

Tahir, Arifin 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2008 Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Imleentasi Kebijakan Publik). Jakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Program Strategis Pembangunan Dan Kelembagaan Kampung seyolo